

Desain Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Mitigasi Bencana di Kabupaten Pacitan

*Decision-Making Design in Village Development Planning Deliberations
in The Field of Disaster Mitigation in Pacitan Regency*

Burhanudin Mukhamad Faturahman*, Qoyyumi Nasukha Adzikri*

*Universitas Indonesia **Universitas Negeri Surabaya

Email: *burhanmfatur@gmail.com, **rumbi.nasukha@gmail.com

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 3 Februari 2025 Direvisi: 16 Mei 2025 Disetujui: 24 Mei 2025 doi: 10.22212/jp.v16i1.4839	Disaster events have impacts that can harm various aspects of community life, thus requiring efforts for disaster risk reduction. Pacitan Regency has a high level of threat from landslides, floods, and tsunamis, but disaster issues have not yet become a development priority. According to policy design theory, the village development planning forum (musrenbangdes) serves as a platform for participatory decision-making discourse on various issues arising within the community, including disaster mitigation. Therefore, it is important to understand how the disaster mitigation decision-making process takes place in the musrenbangdes in Pacitan Regency. The objective of the research is to identify and analyze the disaster mitigation decision-making process in the musrenbangdes in Pacitan Regency. The research method uses a qualitative approach with a case study type, and includes observations of village and urban neighborhood musrenbang forums at 12 locations, where the outcomes are compared with the Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) forum. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that based on disaster events in 2017, disaster mitigation issues were not fully addressed in the musrenbangdes forums. The locations that addressed disaster mitigation issues were Klesem Village, Karanganyar, Sidomulyo, Sidoharjo Urban Village, and Ploso Urban Village. On the other hand, authorities need to raise disaster mitigation issues as formal decisions, as seen in Klesem and Sidomulyo Villages. From the discussion process, only Karanganyar Village and Ploso Urban Village raised disaster mitigation as a forum decision in a deliberative manner. Meanwhile, the IDRIP discussion format is conducted in a deliberative way, where the authorities only ratify the decision outcomes. The musrenbangdes forum needs to adopt the IDRIP format in which decisions purely originate from the community, so that ideas and concepts related to disaster mitigation can be adopted as formal decisions in the forum. Keywords: Decision Making; Disaster Mitigation; Musrenbang.

Abstrak

Kejadian bencana memiliki dampak yang dapat merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan upaya pengurangan risiko bencana. Kabupaten Pacitan memiliki tingkat ancaman tanah longsor, banjir dan tsunami tinggi namun isu kebencanaan belum menjadi prioritas pembangunan. Melalui teori desain kebijakan, terdapat forum musrenbangdes sebagai arena wacana pengambilan keputusan secara partisipatif dari berbagai isu yang berkembang di masyarakat termasuk mitigasi bencana, oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan mitigasi bencana dalam musrenbangdes di Kabupaen Pacitan. Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisa proses pengambilan keputusan mitigasi bencana dalam musrenbangdes di Kabupaen Pacitan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi

kasus serta melakukan observasi pada forum musrenbang kelurahan dan desa di 12 lokasi dimana hasil keputusan akan dibandingkan dengan forum Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP). Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan berdasarkan kejadian bencana tahun 2017, isu mitigasi bencana belum sepenuhnya ditangkap dalam forum musrenbangdes. Lokasi yang menangkap isu mitigasi bencana yaitu Desa Klesem, Karanganyar, Sidomulyo, Kelurahan Sidoharjo dan Kelurahan Ploso. Di sisi lain, pemegang otoritas perlu memunculkan isu mitigasi bencana sebagai keputusan terdapat di Desa Klesem dan Sidomulyo. Dari proses diskusi, hanya Desa Karanganyar dan Kelurahan Ploso yang mengusung isu mitigasi bencana sebagai keputusan forum secara deliberatif. Sementara itu format diskusi IDRIP dilakukan secara deliberatif dimana pemegang otoritas hanya mengesahkan hasil keputusan. Forum musrenbangdes perlu mengadopsi format IDRIP dimana keputusan murni berasal dari masyarakat agar ide dan gagasan terkait mitigasi bencana dapat menjadi keputusan dalam forum.

Kata Kunci: Pengambilan Keputusan; Mitigasi Bencana; Musrenbang.

Pendahuluan

Penanggulangan bencana merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah di mana secara geografis Indonesia merupakan negara paling berisiko ke-2 di dunia setelah Filipina.¹ Profil risiko yang sangat kompleks termasuk kombinasi beragam exposure dan intensitas tinggi menjadikan Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Jumlah kejadian bencana Indonesia sendiri di dominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sebesar 90 persen² dengan kerugian materi (rumah, fasum dan sarpras layanan dasar) mencapai 34.197 unit rusak serta 1.592 orang meninggal dari periode tahun 2020-2024.³

Banyaknya kerugian materi dan jiwa terdampak bencana diperlukan upaya penanggulangan bencana melalui Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 yang menjadi acuan global termasuk Indonesia dalam menanggulangi bencana. Terdapat prioritas dalam Sendai Framework 2015-2030⁴ pertama, memahami risiko bencana; kedua, memperkuat tata kelola risiko bencana; ketiga, berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana; keempat, meningkatkan kesiapsiagaan untuk efektivitas respon.

Selain upaya pemerintah dalam pengurangan risiko bencana melalui jalur legal formal yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana, terdapat upaya masyarakat dalam mengurangi risiko bencana yang sudah ada dan mencegah timbulnya risiko baru. Unsur masyarakat sangatlah penting karena sebagian dari mereka pernah menjadi korban kejadian bencana, kehilangan harta dan aset, gangguan aktivitas baik sosial dan ekonomi dan hilangnya rasa aman sehingga perlu membentuk ketangguhan masyarakat untuk mengurangi dan mencegah dampak bencana tersebut.⁵

Penanggulangan bencana dalam konteks pembangunan harus selaras dengan perencanaan pembangunan di mana unsur masyarakat berperan penting dalam proses penanggulangan

1 Institute for International Law of Peace and Armed Conflict, "WorldRiskReport 2024 Focus: Multiple Crises," 2024.

2 BNPB. Data Bencana Indonesia 2023 (PDI, BNPB, 2024)

3 BNPB. Data Informasi Bencana Indonesia 2020-2024 (Pusdatinkom, BNPB, 2024)

4 UNISDR. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Genewa: SFDR, 2015)

5 Juli Sapitri Siregar and Adik Wibowo, "UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA PADA KELOMPOK RENTAN," Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana 10, no. 1 (2019): 30-38.

bencana seperti pasal 37 ayat 2 poin b melalui perencanaan partisipatif dan pasal 39 terkait pemaduan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.⁶ Untuk mengakomodir konsep dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana tersebut maka diadakan sebuah forum yang dikenal Musrenbang (musrenbang). Fungsi utama forum tersebut yaitu mempertemukan berbagai stakeholder yang benar-benar menerapkan prinsip *bottom-up* terkait kebutuhan masyarakat atau aspirasi melalui proses identifikasi kebutuhan hingga penganggaran kebutuhan.⁷ Umumnya musrenbang dilakukan dari tingkat terbawah yaitu dusun hingga nasional, namun penelitian ini membatasi penelitian musrenbang hanya di tingkat desa (musrenbangdes) sebagai tahap awal menampung aspirasi masyarakat.

Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko bencana. Peran tersebut meliputi identifikasi wilayah rawan bencana, mitigasi infrastruktur kawasan rawan bencana, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.⁸ Sehingga melalui musrenbangdes, pemerintah desa dapat menghasilkan keputusan strategis melalui proses musyawarah terkait prioritas pembangunan desa termasuk kebutuhan mitigasi bencana.⁹

Penelitian terdahulu dari Epianu Halawa dan Fransiskus Pascal Bali (2020) membahas peran pemerintah desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan desa secara deskriptif kualitatif. Pada sektor kebencanaan terdapat penelitian dari Dzikri Fadhillah Rahman, Lukman Munawar Fauzi dan Waluyo Zulfikar (2025) di mana peran pemerintah desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur di masa tanggap darurat kekeringan meliputi fasilitator, dinamisator, regulator dan kalisator dilakukan secara deskriptif kualitatif. Pada tahap mitigasi bencana penelitian dari Septian Dwi Pangestu dan Muhammad Fedryansyah (2023) membahas implementasi mitigasi bencana melalui Kampung Siaga Bencana desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang secara deskriptif kualitatif dimana hasilnya sudah optimal dari aspek pelaksanaan dan keikutsertaan masyarakat namun dari aspek monitoring dan evaluasi belum optimal.¹⁰ Masih dalam metode yang sama penelitian dari Kurnia Dwi Anggraini (2021) upaya mitigasi bencana desa Kademangan Kabupaten Jombang dibentuk organisasi tanggap bencana desa melalui peraturan pemerintah desa serta upaya mobilisasi warga dalam mitigasi bencana.¹¹

Penelitian dari Muhammad Aqiel Baehaqie, Agus Irfan, Sastra Abijaya dan Eka Wildanu (2023) secara kualitatif mengenai kebijakan penanggulangan bencana pemerintah Desa Gebang Ilir Kabupaten Cirebon menunjukkan hasil yang optimal di mana pemerintah desa berwenang dalam mengatur anggaran desa, memberikan edukasi masyarakat, sebagai media komunikasi dan peran pemulihan bagi korban bencana.¹² Berdasarkan penelitian terdahulu mitigasi bencana

6 Kumorotomo, Wahyu. Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24/2007.

7 Toar, Kevin., Kasenda, Ventje dan Singkoh, Frans. "Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Utara". Eksekutif Vol. 3 No. 3, 2019:1-10

8 Dzikri Fadhillah Rahman, Lukman Munawar Fauzi, Waluyo Zulfikar. "Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta". Praxis Idealis Vol. 2 No.1, 2025 1-8

9 Epianu Halawa dan Fransiskus Pascal Bali. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli". Jurnal Governance Opinion No. 2 (0 Oktober 2020): 76-83

10 Septian Dwi Pangestu dan Muhammad Fedryansyah. "Implementasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana Di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang". Focus No. 1 (Juli 2023): 192-201

11 Kurnia Dwi Anggraini. "The Role of Village Governments in Reducing the Risk of Flood Disaster Through Disaster Preparedness Villages". Indonesian Journal of Cultural and Community Development (June 2021): 6-9

12 Muhammad Aqiel Baehaqie, Agus Irfan, Sastra Abijaya dan Eka Wildanu. "Peran Pemerintahan Desa Dalam

di level pemerintah desa menekankan pada peran dan kebijakan pemerintah desa dalam hal mendorong partisipasi masyarakat, pengaturan anggaran kebencanaan, pembentukan regulasi hingga organisasi kebencanaan desa, hal tersebut berbeda dengan peneliti yang menekankan pengambilan keputusan pada forum musrenbangdes sebagai wadah proses penyaluran aspirasi masyarakat secara *bottom up* terutama mengenai isu kebencanaan. Kolektifitas menjadi utama agar aspirasi masyarakat dapat terdengar dan memberi peluang untuk memengaruhi keputusan institusi.¹³

Di Kabupaten Pacitan terdapat kondisi geografis perbukitan (kemiringan 31-50%) sebesar 52%¹⁴ dan kondisi curah hujan periode tertentu serta wilayahnya berbatasan dengan samudera hindia menjadikan Kabupaten Pacitan sebagai daerah rawan bencana banjir, tanah longsor dan tsunami dengan tingkat ancaman dan kerentanan yang tinggi.¹⁵ Berdasarkan kejadian bencana tahun 2017, periode tersebut merupakan kejadian bencana terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Pacitan dimana korban meninggal dan hilang sebanyak 25 jiwa.¹⁶ Di sisi lain kerusakan rumah sebanyak 11.303 unit¹⁷ dengan kerugian mencapai 25 miliar rupiah di tahun 2017¹⁸, namun total kerugian kejadian bencana sampai dengan tahun 2023 mencapai 86 miliar rupiah.¹⁹ Meskipun tidak ada kejadian tsunami, ancaman tsunami menjadi perhatian tersendiri dengan adanya program IDRIP dari World Bank di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan potensi ancaman dan jumlah kejadian bencana di setiap tahunnya dan kerugian yang dialami maka isu kebencanaan penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pada forum musrenbangdes. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perumusan kebijakan yang menghasilkan pilihan di antara beberapa alternatif.²⁰ Dalam desain kebijakan, suatu isu dapat ditangkap oleh pengambil keputusan jika terdapat aktor yang mendukungnya berdasarkan nilai dan preferensi dari aktor tersebut.²¹

Dukungan aktor terhadap isu kebencanaan sangat penting dimana selama ini program penanggulangan bencana belum sepenuhnya menjadi program prioritas di daerah terlebih Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih menjalankan tugas business as usual.²² Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan mitigasi bencana dalam musrenbangdes di Kabupaten Pacitan? sementara tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisa

Penanggulangan Dan Pemulihan Pasca Bencana Banjir Di Desa GebangIlir kecamatan Gebang kabupaten Cirebon” SOSFILKOM No. 1 (Januari-Juni 2023):14-19

- 13 Far Far., R., A. “Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional.” Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 11, No. 1, 2022:57-76
- 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pacitan 2022-2026. (BPBD Pacitan, 2022).
- 15 Ibid. hal 81).
- 16 Burhanudin Mukhamad Faturahman, “Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik,” PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 3, no. 2 (October 2018): 122–34.
- 17 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kejadian bencana dan kerugian Tahun 2020-2022. Diakses 3 Maret 2023. <https://dibi.bnpb.go.id/home/index2>
- 18 pusatkrisis.kemkes.go.id, Banjir dan Tanah Longsor di Pacitan, Jawa Timur, 6 Maret 2019, diakses 15 Januari 2025. [https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir %20dan%20Tanah%20Longsor-di-PACITAN-JAWA%20TIMUR-06-03-2019-6](https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir%20dan%20Tanah%20Longsor-di-PACITAN-JAWA%20TIMUR-06-03-2019-6)
- 19 grindulufm.co.id, Bencana Setahun 778 Kasus, Estimasi Kerugian Capai Rp.16 Miliar Lebih,, 26 Desember 2023, diakses 16 Januari 2025. <https://www.grindulufm.co.id/2023/12/bencana-setahun-778-kasus-estimasi.html>
- 20 Ilhami, Rizky. “Analysis Of Actor Involvement In Education Policy Networks”. Jurnal Ekonomi, Vol. 12 No. 2, 2023: 1948-1953
- 21 Eferemo, Okoro Faith. “Actors And Roles In Decision-Making Process”. Politecnica, 2016: 1-9
- 22 Antaranews.com, BNPB: Program penanggulangan bencana belum jadi prioritas di daerah, 2 November 2022, diakses 19 Januari 2025. <https://www.antaranews.com/berita/3217969/bnpb-program-penanggulangan-bencana-belum-jadi-prioritas-di-daerah>

proses pengambilan keputusan mitigasi bencana dalam musrenbangdes di Kabupaten Pacitan.

Desain Kebijakan

Menurut Winter perumusan kebijakan terdapat tahap agenda setting dimana representasi para politisi dilibatkan yang mengindikasikan arah kebijakan, sementara hasil pengambilan keputusan berkaitan dengan konflik, objek kebijakan, pemilihan instrumen kebijakan dan teori kausalitas yang memandu suatu desain kebijakan.²³ Model integrasi implementasi dari Winter menyoroti koneksi yang buruk antara formulasi dan implementasi kebijakan dapat ditemukan sejak proses perumusan/desain kebijakan sebagai akar masalah dalam kebijakan. Untuk melihat permasalahan dalam desain kebijakan, peneliti menggunakan kerangka pemikiran dari Schneider & Ingram mengenai desain kebijakan demokratis.²⁴ Dalam teori desain kebijakan demokratis tersebut terdapat arena wacana sebagai lokus dari definisi masalah dan gambaran kebijakan diubah ke dalam keputusan. Dengan banyaknya aktor yang terlibat memberikan tekanan tersendiri terhadap keputusan sehingga menuntut adanya framing issues/ tangkapan isu dari setiap aktor yang saling terkoordinasi.²⁵

Selanjutnya, berdasarkan Carsten terdapat tiga tipe arena wacana, kategori *governance* tipe II yang berkaitan dengan individu atau anggota komunitas sebagai pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui musrenbangdes. Dalam hal ini hasil keputusan dari governansi tipe II bersifat independen dan cenderung menghindari konflik. Berbeda dengan governansi tipe I yang rentan konflik karena menyangkut batasan yurisdiksi berbagai kepentingan kelompok tertentu. Akan tetapi governansi tipe I juga terlibat dalam forum musrenbang, sementara tipe digitalisasi merupakan arena baru dalam desain kebijakan di mana akses online menjadi faktor utama dalam proses administratif.²⁶

Pengambilan keputusan secara otoritas merupakan tanggung jawab pemegang wewenang tapi intervensi bersamaan dari aktor yang lebih luas menjadi pencarian pengakuan terhadap kebutuhan dan inklusifitas mereka dalam agenda kebijakan khususnya individu dan warga negara. Dinamika perubahan ekonomi, demografi dan sosial turut membuka proses pengambilan keputusan dari tradisional (berbasis kelompok elite) ke partisipasi publik serta didukung oleh digitalisasi layanan publik dan media sosial telah memberikan warga negara kesempatan untuk memobilisasi, berorganisasi dan memengaruhi penetapan prioritas. Para pembuat kebijakan seharusnya juga menanyakan pada warga negara melalui proses konsultasi untuk menambah pengetahuan sehingga warga negara dapat dilibatkan lebih awal dalam proses membentuk dialog sosial dan kebijakan serta mengidentifikasi tantangan mendesak, misi dan intervensi kebijakan terkait.²⁷

23 Vancoppenolle, Diederik., Sætren, Harald dan Hupe, Peter. "The Politics of Policy Design and Implementation: A Comparative Study of Two Belgian Service Voucher Programs". *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* Vol. 17 No.2, 2019:157-173.

24 Moran, Michael, Rein, Martin, & Goodin, Robert., E. *Handbook Kebijakan Publik: Bab 8 Analisis untuk Demokrasi*, Schneider & Ingram. (Bandung, Nusa Media, 2015:219)

25 Michels, Ank. "Citizen Participation in Local Policy Making: Design and Democracy". *International Journal of Public Administratio* Vol. 35 No. 4, 2012:285-292.

26 Carstens, Nora. "Digitalisation Labs: A New Arena for Policy Design in German Multilevel Governance." *German Politics*, Vol.32 No.2 2021: 249-266

27 Chicot, Julien dan Domini, Alberto. "The Role of Citizens In Setting The Visions For Mission-Oriented Research And Innovation". *Fteval Journal* Vol. 47, 2019: 51-61

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena selain desainnya mudah dipahami kalangan peneliti dan akademisi²⁸ peneliti mencoba mendapatkan tangkapan peristiwa secara lebih baik²⁹ dalam interaksi manusia³⁰ sementara jenis studi kasus dipilih karena suatu peristiwa harus diteliti dengan cermat dan teliti guna mengungkap kasus tertentu. Kesimpulan studi kasus tidak bisa digeneralisasikan kecuali pada objek kelompok atau unit dengan karakteristik sama.³¹

Selain itu peneliti melakukan observasi pada forum diskusi publik yang difasilitasi oleh pemerintah yaitu musrenbang di 10 desa dan 2 Kelurahan. Peneliti memilih lokasi tersebut berdasarkan hasil wawancara, observasi, data Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pacitan termasuk desa yang menjadi ampunan IDRIP. Sebagai pembanding, peneliti juga melakukan observasi pada *Focus Group Discussion* dari *Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project*. Peneliti melakukan pengamatan terhadap 1) usulan audiens, 2) dinamika diskusi dan 3) keputusan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³²

Benchmark Kejadian Bencana dan Ancaman Tsunami di Kabupaten Pacitan

Paradigma penanggulangan bencana suatu daerah dapat berubah berdasarkan keadaan darurat yang pernah terjadi terutama skala dampak yang ditimbulkan. Pada tahun 2004 silam kejadian bencana tsunami di Aceh memberikan dampak bagi paradigma penanggulangan kebencanaan di Indonesia dari tanggap darurat ke pengurangan risiko bencana ditandai³³ dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di mana kondisi dan langkah-langkah kegiatan pra bencana telah diatur dalam pasal 34 sampai dengan 47.³⁴

Tentunya dampak kejadian tsunami 2004 silam telah memberikan pelajaran dan kemampuan untuk belajar dari peristiwa baik pemerintah dan masyarakat. Pandangan terhadap kebencanaan secara konvensional berubah menjadi holistik karena bencana termasuk dalam urusan layanan kepada masyarakat sehingga berbagai elemen dituntut meningkatkan perhatiannya pada kegiatan pra bencana meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini di samping tetap memperhatikan kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana.

Di Kabupaten Pacitan sendiri terdapat kejadian bencana besar di tahun 2017 yaitu banjir dan tanah longsor. Besarnya kejadian tersebut dapat dilihat dari luasan dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Pacitan³⁵ dan kesepakatan pada forum diskusi publik³⁶ didapati bahwa kejadian bencana di tahun 2017 silam sebagai rujukan penanggulangan bencana di daerah serta mengubah cara pandang masyarakat

28 Rijal Muhammad Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika*, 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

29 Rahadjo, M. *Interaksionisme Simbolik dalam Penelitian Kualitatif*. (UIN Malang, 2018)

30 Laksmi. "Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi". *PUSTABIBLIA* Vol. 1 No. 1, 2017:126

31 Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

32 Rohidi, Rohendi.Cecep dan Mulyarto. *Analisi data kualitatif*. (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992)

33 Wahid, Khalil Abdul. *Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia*. Universitas Negeri Malang, 2022.

34 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

35 Wawancara dengan D dari BPBD Kabupaten Pacitan tanggal 23 Juli 2024

36 Observasi FGD Rencana Kontingensi Tanah Longsor tanggal 24 Oktober 2024

terhadap kondisi kebencanaan menjadi lebih sadar terhadap urusan kebencanaan dan aktif dalam pengurangan risiko bencana. Berikut review kejadian bencana alam di Kabupaten Pacitan tahun 2017.

Tabel 1. Dampak Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017

Jenis bencana	Banjir	Tanah longsor
	6 Kecamatan, 34 Desa Luas 205,58 km ²	12 Kecamatan, 68 Desa, 196 Titik
Jumlah pengungsi	Terpusat 1532 jiwa	Mandiri 6487 jiwa
Kerusakan	Fisik Perumahan: 6603 unit Jalan & jembatan: 22.749 m Perhubungan: 328 unit Energi: 116 unit Air bersih: 832 m Sumberdaya air: 35 titik Kesehatan: 7 unit Sekolah: 126 unit Agama: 4 unit	Ekonomi dan lintas sektor Pertanian: 1.285 Ha Pangan: 4 titik Sapi 155 ekor Kambing: 1.925 ekor Unggas: 7250 ekor Perikanan: 61 unit Perdagangan: 6 unit Koperasi UMKM: 17 unit Industri & wisata: 1.003km ² & 6 titik Pemerintahan: 17 unit Lingkungan hidup: 14 unit

Sumber: BPBD Kabupaten Pacitan, 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa besarnya dampak kejadian bencana di tahun 2017 yang terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan. Dampak kejadian banjir cenderung lebih sedikit daripada tanah longsor karena daerah yang terdampak merupakan dataran rendah meliputi perkotaan, bantaran sungai dan kawasan pesisir. Pada jumlah pengungsi, sebagian besar dilakukan secara mandiri dan sebagian kecil ikut pada tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah. Para pengungsi yang dilakukan secara mandiri memilih menempati rumah saudara yang dianggap aman sebagai tempat pengungsian.³⁷

Kerusakan pada infrastruktur sendiri terdiri dari jalan, sarpras layanan dasar dan agama, energi dan sumber air. Saat peristiwa terjadi, Kabupaten Pacitan sempat terisolasi selama beberapa hari³⁸ dikarenakan jalan utama ke arah barat dan arah timur terkena longsor dan amblas. Terdapat juga kerugian lainnya terkait aspek non fisik seperti bidang peternakan, perdagangan, pemerintahan dan lingkungan. Besarnya kerugian bencana di tahun 2017 belum mengubah paradigma penanggulangan bencana Kabupaten Pacitan terutama dari sisi pembuatan kebijakan. Pada dasarnya aspek lingkungan telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimana terdapat muatan perlunya strategi pengurangan risiko bencana dan pelayanan khusus terhadap korban bencana. Meskipun sudah masuk dalam agenda Rencana Pembangunan Menengah Daerah, secara empiris tangkapan isu kebencanaan secara politis masih belum optimal pada pembuat kebijakan. Mengingat pentingnya perubahan perspektif terhadap bencana dan dampak yang ditimbulkan di tahun 2017 seharusnya model pembangunan Kabupaten Pacitan lebih memperhatikan aspek kebencanaan artinya keperluan mitigasi bencana masuk dalam program layanan dasar dan framing isu kebencanaan oleh pembuat kebijakan dapat disampaikan dengan baik.

37 Wawancara dengan S. dari pemdes desa Karanggede tanggal 15 Januari 2025

38 Wawancara dengan D dari ISIMU Pacitan tanggal 11 November 2024

Para politisi lokal sebagai aktor dalam pembuat kebijakan cenderung belum menangkap isu pengurangan risiko bencana dari peristiwa kejadian bencana besar tahun 2017. Sampai saat ini secara eksplisit visi pembangunan yang diusung oleh para politisi tidak mengangkat isu kebencanaan.³⁹ Visi dari para politisi yang sedang menjabat dianggap penting karena dari visi dapat di turunkan ke misi kemudian diteruskan ke program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah terutama yang berkaitan dengan kebencanaan. Isu pengurangan risiko bencana dianggap kurang seksi oleh para politisi ketimbang isu pembangunan infrastruktur terutama poros jalan tingkat kecamatan hingga tingkat dusun yang memang sedang dibutuhkan masyarakat.

Selain banjir dan tanah longsor, tingkat risiko tsunami di Kabupaten Pacitan tinggi untuk wilayah yang berada di wilayah pesisir meliputi Pringkuku, Donorojo, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro.⁴⁰ Secara umum pembahasan terkait gempa *megathrust* sebesar 8,7-8,9 SR selat sunda dan mentawai-siberut telah menjadi isu nasional di mana pemerintah meminta masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi guncangan gempa besar dan tsunami.⁴¹ Perhatian terhadap ancaman tsunami di Kabupaten Pacitan sendiri menjadi utama dibandingkan jenis bencana yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan telah banyaknya organisasi non pemerintah (*Non Government Organization*) yang berkontribusi bagi masyarakat baik struktural dan non struktural khususnya di wilayah pesisir pacitan seperti IDRIP dari World Bank, Disaster Management Centre Dompot Dhuafa, The International Organization for Migration (IOM) dan Rumah Zakat.

Keberadaan dari *Non Government Organization* tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana tsunami baik dari segi anggaran dan keahlian.⁴² Kontribusi organisasi non pemerintah berbentuk dokumen pengurangan risiko bencana hingga rencana evakuasi terdapat pada forum IDRIP di enam wilayah (kelurahan sidoharjo dan plosa, desa kembang, desa sumberejo, desa sidomulyo dan desa hadiwarno). Produk dokumen kesiapsiagaan tsunami juga diinisiasi oleh The International Organization for Migration dengan produk akhirnya adalah rencana kontingensi gempa dan tsunami di Kabupaten Pacitan. Sementara *Non Government Organization* dompet dhuafa dan rumah zakat berkontribusi dalam pencarian dana untuk mitigasi kebencanaan, inisiasi penanaman *mangrove* di kawasan pesisir.⁴³ Dengan adanya landasan empiris kejadian bencana pada banjir dan tanah longsor maupun progresifitas mitigasi bencana berbentuk dokumen pada bencana tsunami, tangkapan isu kebencanaan penting untuk diangkat dalam arena wacana melalui forum publik.

Pengambilan Keputusan Mitigasi Bencana dalam Musrenbangdes

Pada bagian ini diuraikan tentang bagaimana tangkapan isu kebencanaan meliputi banjir, tanah longsor dan tsunami dalam musrenbang desa kemudian dibandingkan dengan forum publik yang diselenggarakan oleh IDRIP.

39 Wawancara dengan D dari Unmer Madiun tanggal 14 November 2024

40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pacitan 2022-2026. (BPBD Pacitan, 2022:178)

41 Dewi, Intan Rakhmayanti. BMKG Sebut Gempa Megathrust RI Hanya Tunggu Waktu, Ini Zona Merahnya. 30 Desember 2024. Diakses 24 Januari 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241230110310-37-599471/bmkg-sebut-gempa-megathrust-ri-hanya-tunggu-waktu-ini-zona-merahnya>

42 Wawancara dengan A dari Bappedalitbang tanggal 28 Oktober 2024

43 Wawancara dengan S dari dusun kiteran tanggal 15 September 2024

Proses Diskusi dalam Musrenbang Desa

Musrenbang di tingkat desa atau kelurahan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di mana secara prosedural masing-masing daerah memiliki periode penyelenggaraan musrenbang yang berbeda-beda. Untuk musrenbang tingkat kelurahan telah dilaksanakan di bulan januari sesuai pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan keputusan mendagri nomor 050-187/kep/bangda/2007 dan paling akhir dilaksanakan bulan februari.⁴⁴ Sementara perencanaan pembangunan tingkat desa memiliki variasi jadwal pelaksanaan. Berdasarkan hasil observasi periode pelaksanaan musrenbang desa pada bulan agustus akan tetapi beberapa desa dilaksanakan di bulan oktober serta terdapat penggabungan kegiatan antara pra musrenbang dengan musrenbang di tingkat desa.

Kegiatan pra musrenbang atau musyawarah antar dusun idealnya di laksanakan sebelum musrenbang desa agar stakeholder dapat mempersiapkan materi untuk kegiatan saat musrenbang tingkat desa sesuai pedoman mendagri nomor 050-187/kep/bangda/2007. Penggabungan dua kegiatan tersebut berdampak pada hasil keputusan di tingkat desa yang cenderung *top down* karena aktor yang memiliki wewenang di desa memutuskan kegiatan tanpa adanya proses deliberasi dengan masyarakat. Meskipun juga terdapat pelaksanaan musrenbang desa sesuai jadwal namun pengambilan keputusan cenderung *top down*. Berikut tabel usulan dalam musrenbang desa dengan melihat usulan mitigasi bencana.

Hasil observasi pada kegiatan musrenbang dilakukan di 2 kelurahan dan 10 desa dengan mempertimbangkan hasil wawancara⁴⁵, acuan kegiatan dari IDRIP dan kelas bahaya matriks Kajian Risiko Bencana dari BPBD. Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil keputusan pada kegiatan musrenbang kelurahan dan desa cenderung *top down* untuk lokasi yang menyelenggarakan dua kegiatan musrenbang pada hari yang sama yaitu di desa Petungsinarang. Meskipun tidak dominan, keputusan *top down* tersebut merupakan representasi pemegang otoritas di desa di mana tim perumus kegiatan pra musrenbang hanya menyampaikan kembali hasil kerjanya pada kegiatan musrenbang tingkat desa tanpa proses deliberasi. Keputusan *top down* lainnya terdapat di desa Klesem, Kembang, dan Sidomulyo.

Tangkapan isu kebencanaan pada masing-masing musrenbang belum sepenuhnya mempertimbangkan isu tersebut meskipun wilayahnya berada di lokasi rawan bencana yaitu di desa Desa Sumberejo, Penggung, Karangnongko, Kledung, Petungsinarang, Kembang dan Hadiwarno. Khusus Desa Hadiwarno terdapat anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana berasal dari warga akan tetapi anggota tersebut tidak menyampaikan kebutuhan terkait mitigasi bencana. Hal ini dikarenakan isu stunting, kemiskinan, pendidikan dan infrastruktur jalan lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa. Meskipun hasil keputusan *top down*, beberapa desa melalui aktor pemerintahan desa memasukkan isu kebencanaan yang mengarah pada mitigasi dan pasca bencana seperti Desa Sidomulyo, Karanganyar dan Klesem yang disampaikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

44 Almash,, R.,R dan Pesoth, W., F. Efektifitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan Di Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi, 2012.

45 Wawancara dengan A dari Bapedalitbang tanggal 21 Agustus 2024

Tabel 2. Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan dan Desa Bidang Mitigasi Bencana tahun 2024

Lokasi dan bahaya	Format Diskusi	Hasil keputusan	Usulan untuk Kebencanaan
Desa Klesem (Tanah longsor)	Musrenbangdes	Top down	Bantuan korban longsor tahun 2023
Desa Sumberejo (Tsunami)	Musrenbangdes	Deliberatif	Tidak ada
Desa Karanganyar (Tanah longsor)	Musrenbangdes	Deliberatif	Bantuan korban longsor tahun 2023, Drone untuk memantau kawasan longsor jika tidak bisa dijangkau, perbaikan talut di sekolah dan pembuatan jalan alternatif jika terjadi longsor
Desa Penggung (Tanah longsor)	Musrenbangdes	Deliberatif	Tidak ada
Desa Karangnongko (Tanah longsor)	Musrenbangdes	Tanya jawab	Tidak ada
Desa Kledung (Tanah longsor)	Musdes dan musrenbangdes	Deliberatif	Tidak ada
Desa Petungsinarang (Tanah longsor)	Musdes dan musrenbangdes	Top down	Tidak ada
Desa Kembang (Banjir & tsunami)	musrenbangdes	Top down	Tidak ada
Desa Sidomulyo (Banjir & tsunami)	musrenbangdes	Top down	Normalisasi pancer dan sungai
Desa Hadiwarno (Banjir & tsunami)	musrenbangdes	Deliberatif	Tidak ada
Kelurahan sidoharjo (Banjir & tsunami)	musrenbangkel	Tanya jawab	Penerangan Jalur evakuasi, perbaikan jalan dan saluran air terdampak bencana 2017
Kelurahan plosor (Banjir & tsunami)	musrenbangkel	Deliberatif	Capaian Destana baik, pemasangan rambu evakuasi dan penanganan banjir perkotaan melalui pavingisasi dan perbaikan saluran air

Sumber: Hasil observasi, matriks KRB 2022, kegiatan IDRIP dan wawancara

Sementara pada musrenbang kelurahan hasil keputusan lebih deliberatif artinya terdapat tanya jawab, sanggahan serta masukan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. Dengan beragamnya hasil keputusan dalam musrenbang terutama bidang mitigasi bencana dapat disimpulkan bahwa isu yang diangkat merupakan sesuatu yang dianggap penting dan menjadi isu terkini di masing-masing kelurahan dan desa, di mana agar isu tersebut menjadi suatu keputusan dalam forum maka otoritas tertinggi harus bersedia mengangkat isu mitigasi bencana jika tidak ada usulan dari masyarakat di bidang mitigasi bencana. Hal ini penting mengingat dalam musrenbang terjadi perebutan isu prioritas di semua aspek kehidupan termasuk bidang mitigasi bencana agar menjadi suatu keputusan.

Proses Diskusi dalam IDRIP: Sebuah Komparasi

Pada tahun 2022 Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan World Bank yang merupakan Non Government Organization untuk melaksanakan proyek prakarsa ketangguhan bencana di Indonesia (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami. Proyek ini dilaksanakan di 25 Provinsi yang dianggap memiliki ancaman

gempa dan tsunami tinggi -dimana Provinsi Jawa Timur⁴⁶ yang ditunjuk adalah Kabupaten Pacitan di 6 lokasi- agar masyarakat memiliki kemampuan mitigasi dalam mengurangi risiko bencana, kemampuan kesiapsiagaan dalam merespon bencana dengan efektif dan kemampuan peringatan dini yang tepat waktu di masyarakat.⁴⁷ Proyek ini berjalan kurang lebih selama dua tahun yakni dari tahun 2022 hingga berakhir pertengahan tahun 2024.

Berdasarkan hasil observasi, aktualisasi dari Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (kelurahan Sidoharjo dan Ploso serta desa Kembang, Sidomulyo, Hadiwarno dan Sumberejo) yaitu sebuah forum diskusi secara partisipatif di mana hasil akhirnya adalah dokumen pengurangan risiko bencana. Kepesertaan forum dibatasi 30 orang meliputi ketua RT/RW, karang taruna, PKK, disabilitas dan akademisi. Masing-masing orang dibagi habis ke dalam kelompok untuk melakukan diskusi terkait topik yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Proses diskusi di forum tersebut deliberatif pada setiap kelompoknya dengan memberikan ide dan gagasan secara dialogis terkait prosedur evakuasi, cara mengurangi risiko, peringatan dini, ancaman di wilayah masing-masing sehingga hasil keputusannya *bottom up*. Hasil keputusan dituangkan dalam beberapa dokumen seperti rencana evakuasi, mitigasi struktural berbasis vegetasi, rencana aksi komunitas, sistem peringatan dini dan simulasi bencana. Forum tersebut secara umum menggambarkan suatu proses pengambilan keputusan *bottom up* mulai dari pembentukan forum pengurangan risiko bencana, penyusunan peta risiko partisipatif, penyusunan rencana penanggulangan bencana oleh komunitas serta penyusunan kegiatan peringatan dini.

Penunjukkan secara langsung di 6 lokasi oleh IDRIP perlu dikomparasi dengan forum yang lebih umum yakni musrenbang di kelurahan/desa. Dengan kata lain peneliti melihat proses diskusi dalam musrenbang di lokasi yang menjadi cakupan kegiatan IDRIP. Dari 6 lokasi yang ditunjuk oleh IDRIP yang memiliki ancaman gempa dan tsunami, peneliti juga melihat terdapat ancaman bencana yaitu banjir karena sebagian besar berada di dataran rendah. Berikut disajikan tabel hasil observasi musrenbang yang menjadi cakupan lokasi IDRIP.

Tabel 3. Usulan Masyarakat Bidang Mitigasi Bencana
Berdasarkan Cakupan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project

Lokasi dan bahaya	Musrenbang	IDRIP	Kaitan IDRIP pada Isu Musrenbang
Desa Sumberejo (Tsunami)	Deliberatif	Deliberatif	Tidak ada
Desa Kembang (Banjir & tsunami)	Top down	Deliberatif	Tidak ada
Desa Sidomulyo (Banjir & tsunami)	Top down	Deliberatif	Tidak ada
Desa Hadiwarno (Banjir & tsunami)	Deliberatif	Deliberatif	Tidak ada
Kelurahan Sidoharjo (Banjir & tsunami)	Deliberatif	Deliberatif	Tambahan penerangan pada jalur evakuasi
Kelurahan Ploso (Banjir & tsunami)	Deliberatif	Deliberatif	Capaian Destana tangguh utama

Sumber: Hasil observasi, dokumen FGD IDRIP di Desa Sumberejo, Hadiwarno dan Kelurahan Ploso

⁴⁶ Wawancara dengan M dari IDRIP tanggal 25 Juli 2024

⁴⁷ BNPB. Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia. Diakses 27 Januari 2025, [https://p2ub.idrip-ina.org/tentang#:~:text=Pada%20tahun%202022%](https://p2ub.idrip-ina.org/tentang#:~:text=Pada%20tahun%202022%20)

Berdasarkan Tabel 2, perbandingan format diskusi dalam musrenbang dengan IDRIP memiliki perbedaan sangat mencolok di mana proses diskusi pada 6 lokasi berjalan deliberatif. Hal ini sangat berbeda dengan proses diskusi dalam musrenbang terkait dinamika dan hasil keputusannya. Forum dari IDRIP memiliki desain deliberatif di mana warga saling melakukan diskusi secara intens dalam kelompok kecil. Semua gagasan dan ide setiap kelompok menjadi keputusan bersama untuk dijadikan dokumen terkait pengurangan risiko bencana. Di sisi lain, forum dari musrenbang di desain untuk *bottom up* akan tetapi peran otoritas di masing-masing daerah sangat dominan, dalam kasus tertentu keputusan dalam musrenbang cenderung *top down* serta isu mitigasi bencana tidak ditangkap dalam forum kecuali isu tersebut disampaikan oleh aktor yang memiliki otoritas di masing-masing daerah.

Kaitan antara kegiatan dari IDRIP dengan musrenbang terdapat di Kelurahan Sidoharjo dan Kelurahan Ploso. Kelurahan Sidoharjo sendiri memiliki jalur evakuasi tsunami di wilayah barat berupa bukit sehingga untuk mempermudah mencapai jalur evakuasi diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seperti penerangan lampu. Sementara di Kelurahan Ploso kegiatan bagian dari IDRIP muncul dalam musrenbang yaitu capaian desatana tangguh utama. Capaian tersebut merupakan hasil survei tim yang dibentuk oleh IDRIP secara berkala. Hal ini penting untuk mengetahui dampak kegiatan FGD saat penyusunan dokumen pengurangan risiko bencana oleh warga sendiri.⁴⁸

Pada aspek kehadiran peserta diskusi memiliki perbedaan antara IDRIP dengan musrenbang. Hasil observasi menunjukkan bahwa perbedaan terletak pada konsistensi kehadiran peserta diskusi IDRIP yang lebih konsisten daripada peserta diskusi musrenbang kelurahan atau desa. Meskipun forum diskusi dari World Bank pesertanya hanya dibatasi hingga 30 orang namun mereka selalu hadir dalam proses diskusi dimana setiap peserta yang hadir mendapat insentif dari pihak World Bank. Sementara musrenbang desa kehadiran peserta lebih fluktuatif dengan rentang peserta 20-55 orang. Meskipun lebih banyak peserta hadir dalam musrenbang sebagian besar dari mereka adalah ketua dari RW dan RT dan Kepala dusun, ketua PKK, ketua BPD serta perangkat kelurahan atau desa.

Dengan melihat pentingnya peran masyarakat dalam musrenbang maka pelaksanaan kegiatan tersebut idealnya harus melibatkan masyarakat non pemerintah atau masyarakat yang berada di luar pemerintahan baik tingkat kelurahan maupun desa. Aktor dari non pemerintah termasuk stakeholder lokal seharusnya lebih banyak dilibatkan mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrenbang.⁴⁹

Untuk skala prioritas sendiri dapat dengan mudah dipahami bahwa forum musrenbang tingkat kelurahan dan desa merupakan wadah aspirasi masyarakat yang bersifat urusan rutin seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Beberapa bidang tersebut sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga mayoritas usulan yang muncul dalam musrenbang adalah urusan rutin tersebut. Untuk urusan kebencanaan terutama isu mitigasi bencana tergolong sangat sedikit masyarakat yang mengangkatnya dalam forum musrenbang. Peserta diskusi yang mengusulkan urusan mitigasi bencana sangat sedikit seperti Desa Sidomulyo, Kelurahan Sidoharjo dan Kelurahan Ploso. Sementara di sebagian besar desa mengusulkan urusan kebencanaan tahap pasca bencana meliputi bantuan korban,

48 Wawancara dengan R dari Desa Sidomulyo tanggal 18 September 2024

49 Darin, moonti, Usman dan Dai, Sri Indriyani S. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa". Jurnal Oikos-Nomos Vol.15 No.1, 2022:11-21

perbaikan jalan dan talud terdampak bencana.

Pembahasan mitigasi bencana dalam musrenbang relatif lebih sering ditingkat kelurahan yang notabene merupakan wilayah rawan banjir dan tsunami. Untuk Kelurahan Sidoharjo terdapat warga yang mengusulkan penerangan jalan menuju jalur evakuasi di mana tamperan merupakan kawasan rawan tsunami. Di Kelurahan Ploso, pembahasan terkait mitigasi bencana disampaikan langsung oleh Lurah untuk memperbaiki saluran air dan melakukan pavingisasi di lingkungan karena selain merupakan kawasan yang sering terdampak banjir amanat dari Bupati perlu dilaksanakan oleh Lurah untuk mengurangi banjir yang sering terjadi di wilayah perkotaan terutama saat musim penghujan.

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana antara forum musrenbang dengan forum yang diselenggarakan oleh IDRIP lebih efektif forum yang diselenggarakan oleh IDRIP karena memang forum yang dibiayai oleh Non Government Organization tersebut tematik atau khusus membahas kebencanaan. Sementara tangkapan isu mitigasi bencana dalam musrenbang sangat sedikit terutama di tingkat desa walaupun desa tersebut memiliki tingkat ancaman bencana tinggi. Hal ini dikarenakan isu mitigasi bencana harus bersaing dengan urusan rutin lainnya yang dianggap lebih prioritas dalam forum yang bersifat umum. Diperlukan aktor yang memiliki otoritas di masing-masing desa untuk mengangkat isu mitigasi bencana agar menjadi keputusan dalam musrenbang mengingat forum ini merupakan wadah penjangkaran aspirasi secara *bottom up* untuk menjadi program kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Desain Pengambilan Keputusan: Elite, Semi Otokratis dan Deliberatif

Proses pengambilan keputusan sendiri memiliki serangkaian interaksi adanya tuntutan kemudian diproses menjadi keluaran atau output. Para pengambil keputusan diharapkan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, sementara keputusan dipengaruhi oleh kekuasaan dan pola komunikasi dari aktor.⁵⁰ Subbagian ini menguraikan model keputusan baik dalam musrenbangdes maupun kegiatan dari IDRIP sebagai pembandingnya. Dua forum tersebut menjadi acuan peneliti untuk menganalisis hasil keputusan terkait mitigasi bencana.

Sebagaimana teori dari Schneider dan Ingram, desain kebijakan dibentuk oleh aktor yang saling berkoordinasi sehingga memberikan tekanan pada isu tertentu. Keterlibatan aktor dalam forum musrenbangdes dan forum IDRIP selalu menyertakan pemegang otoritas tertinggi seperti kepala desa atau lurah selain menyertakan berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, ketua RT hingga ketua RW dan ketua organisasi/ lembaga masyarakat. Terdapat faktor yang membuat keputusan dikategorikan: 1) elite yaitu terbatasnya waktu pelaksanaan forum dan minimnya ide/gagasan dari masyarakat, 2) keputusan semi otokratis di mana ide/gagasan masyarakat aktif disampaikan kepada pengambil keputusan, 3) keputusan yang deliberatif dihasilkan melalui proses diskusi antar warga/masyarakat dari awal hingga akhir sementara pengambil keputusan hanya bersifat mengesahkan hasil keputusan. Berikut diuraikan kategori keputusan dari forum musrenbangdes dan IDRIP.

Pertama, keputusan berdasarkan otoritas yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan dimana posisi atau kedudukan menjadi faktor utama.⁵¹ Jenis keputusan ini terdapat pada forum musrenbang tingkat desa di Desa Klesem, Petungsinarang, Kembang

50 Sagi, Srilalitha. "The Use of Power and Authority in Decision Making Process: A Cross Cultural Perspective". *International Journal of Management and Humanities* Vol. 1 No. 7, 2015:12-14

51 Mahanum. "Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Kebijakan". *Sabilarrasyad* Vol. 6 No.1, 2021:154-163

dan Sidomulyo. Masing-masing aktor dari desa tersebut secara langsung memberikan putusan terhadap isu-isu yang menjadi prioritas di desa. Musrenbang Desa Klesem diputuskan oleh kepala desa selaku pemimpin forum dimana peserta yang hadir diminta untuk menyetujui hasil tim perumus kegiatan. Meskipun terdapat usulan terkait pasca bencana yaitu bantuan korban tanah longsor proses tersebut tidak berjalan deliberatif. Di Desa Petungsinarang lebih menonjolkan hasil daripada proses dimana dua kegiatan sekaligus yaitu pra musrenbang dengan musrenbang. Penggabungan dua kegiatan tersebut sama sekali tidak memberikan ruang diskusi kepada peserta karena kegiatan yang sama akan dilakukan kembali pada tahun berikutnya melalui arahan kepala desa. Terlebih, Desa Petungsinarang memiliki kawasan longsor yang tinggi namun isu mitigasi bencana tidak muncul dalam pembahasan musrenbang.

Musrenbang Desa Kembang juga mirip dengan musrenbang Desa Klesem dimana kepala desa selaku pemegang otoritas mengarahkan peserta diskusi untuk menyetujui hasil tim perumus kegiatan saat pra musrenbang. Untuk usulan mitigasi bencana di Desa Kembang sendiri tidak ada. Selanjutnya desa yang memutuskan hasil musrenbang melalui pemegang otoritas yaitu Desa Sidomulyo melalui ketua Badan Permusyawaratan Desa. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo memberikan isu yang menjadi prioritas desa terlebih dahulu sebelum memutuskan hasil musrenbang akan tetapi ketua Badan Permusyawaratan Desa turut memunculkan isu mitigasi bencana berupa normalisasi pancer dan sungai menjelang musim penghujan. Dengan demikian isu mitigasi bencana dapat muncul dalam pembahasan musrenbang jika terdapat aktor pemegang otoritas yang mengusulkannya.

Musrenbang Desa Klesem, Petungsinarang, Kembang dan Sidomulyo menghasilkan keputusan direktif dimana tidak ada interaksi dengan peserta. Gaya pengambilan keputusan ini melakukan pengarahan atau instruksi dari pemegang otoritas.⁵² Dengan demikian pengambilan keputusan berdasarkan otoritas berkaitan dengan hasil keputusan yang direktif.

Kedua, model pengambilan keputusan semi otokratis. Model semi otokratis ini hampir sama dengan model pengambilan keputusan otoritatif atau otoritas hanya saja perbedaannya terdapat pada cara memperoleh informasi si pemegang otoritas. Keputusan semi otokratis diawali dengan pemegang otoritas selalu aktif menanyakan informasi kebenaran kepada peserta diskusi terkait keputusan yang akan diambil untuk memperbaiki hasil keputusan nantinya. Atas dasar informasi kebenaran dari peserta tersebut pemegang otoritas menetapkan keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.⁵³ Model keputusan ini terdapat pada musrenbang Kelurahan Ploso.

Pada proses diskusi, pihak Kelurahan Ploso memberikan materi kepada peserta diskusi terkait program yang akan dikerjakan pemerintah kelurahan. Pihak kelurahan melalui Lurah selalu memberikan ruang bagi peserta untuk menanggapi pada setiap program kerja Kelurahan Ploso yang disampaikan, sementara itu peserta menanggapi atau memberikan masukan program kerja Kelurahan Ploso sesuai kondisi di lingkungannya melalui ketua RW dan Ketua RT. Di antara program kerja yang disampaikan oleh Lurah, terdapat pembahasan mengenai penanggulangan bencana banjir di kawasan perkotaan di mana isu banjir perkotaan selalu muncul ketika curah hujan tinggi sehingga diperlukan pemasangan paving di setiap lingkungan Kelurahan Ploso. Setelah mempertimbangkan masukan dari peserta diskusi, Lurah Ploso selaku aktor pemegang

52 Lande, Alfonso., Ferliandre, Anjas dan Anggrain, Meita. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan: Gaya Kepemimpinan, Kepribadian Dan Strategi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)". JIHHP Vol. 2 No.1, 2021:13-22

53 Raihan, "Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Manajemen Dakwah". Jurnal Al-Bayan Vol. 22 No. 34, 2016:65-78

otoritas memutuskan hasil musrenbang sesuai program kerja Kelurahan.

Model pengambilan keputusan musrenbang Kelurahan Ploso menghasilkan keputusan konsultatif. Hasil keputusan konsultatif merupakan proses pengambilan keputusan melalui interaksi konsultatif antara pemimpin atau pemegang otoritas dengan peserta diskusi, di mana keputusan tersebut mendapat masukan atau tanggapan dari peserta diskusi.⁵⁴ Selanjutnya pemegang otoritas menetapkan keputusan atas dasar tanggapan dan masukan peserta diskusi, akan tetapi pandangan pribadi pemimpin tetap dominan dalam keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian pengambilan keputusan semi otokratis memiliki kaitan dengan hasil keputusan konsultatif. Dari forum musrenbang baik desa maupun kelurahan masuk dalam arena wacana governansi tipe I karena pengambilan keputusan rentan menghasilkan konflik berupa keterbatasan anggaran dan persaingan isu kebencanaan dengan sektor lainnya

Ketiga, model pengambilan keputusan deliberatif. Musrenbang pada hakikatnya dibentuk agar aspirasi masyarakat dapat diakomoodir secara *bottom up* oleh pengambil keputusan. Melalui musrenbang, model deliberatif bertujuan mendudukkan masyarakat sebagai pihak yang tidak ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan. Proses diskusi deliberatif membutuhkan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan saling betukar pengalaman antara warga dengan stakeholder. Hasil akhir proses deliberatif yaitu pencapaian mufakat berdasarkan hasil-hasil diskusi yang mempertimbangkan usulan warga. Keterlibatan warga adalah inti pengambilan keputusan deliberatif.⁵⁵

Dari proses musrenbang Desa Sumberejo, Karanganyar, Penggung, Kledung, Hadiwarno dan Kelurahan Ploso menunjukkan adanya proses deliberatif dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar desa yang menerapkan deliberasi memiliki dinamika yang aktif baik antara stakeholder yaitu perangkat Desa dengan peserta diskusi. Sebagai awalan diskusi, pemegang otoritas terlebih dahulu menjelaskan program kerja Kelurahan/ Desa kemudian peserta diberikan ruang untuk menanggapi dan memberikan masukan atas program kerja yang dibuat. Meskipun terjadi saling tukar pandangan antara pemegang otoritas dan sesama warga sendiri tidak menimbulkan konflik karena kelemahan dan kelebihan setiap program dapat dimaklumi oleh peserta diskusi. Dengan demikian lima desa tersebut masuk dalam arena wacana governansi tipe II.

Model pengambilan keputusan deliberatif dari lima desa dan satu kelurahan menghasilkan keputusan demokratis akan tetapi hanya Desa Karanganyar dan Kelurahan Ploso yang mengusung isu mitigasi bencana sebagai keputusan forum. Hasil keputusan demokratis ini berasal dari musyawarah antara pemegang otoritas dengan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.⁵⁶ Untuk menghasilkan kualitas usulan yang baik pada setiap musrenbang baik tingkat Kelurahan/ Desa diperlukan juga format diskusi dengan mengambil contoh forum deliberatif dari IDRIP. Pengaturan proses diskusi dapat membagi masyarakat ke dalam kelompok berdasarkan pekerjaan atau minat tertentu terkait isu yang sedang berkembang di masing-masing wilayah. Untuk menerapkan skema deliberatif dari IDRIP ke dalam musrenbang diperlukan kesediaan pemegang otoritas yaitu Kepala Kelurahan dan Kepala Desa untuk mengambil keputusan secara mufakat bukan berdasarkan pandangan pemegang otoritas. Dengan demikian model pengambilan keputusan deliberatif memiliki kaitan dengan hasil keputusan demokratis.

54 Ibid, hal. 74

55 Habibah, Bintan Aulia. Efektifitas Dialog Jumat Sebagai Model Pembuatan Kebijakan Publik Deliberatif Di Kabupaten Bojonegoro. Universitas Airlangga.

56 Raihan, "Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Manajemen Dakwah". Jurnal Al-Bayan Vol. 22 No. 34, 2016:65-78

Kesimpulan

Proses identifikasi pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui analisis suatu isu atau permasalahan yang sedang berkembang sebelum kebijakan diimplementasikan. Adanya arena wacana sebagai lokus dari definisi masalah dan gambaran kebijakan diubah menjadi suatu keputusan. Arena wacana dalam penelitian ini mengarah pada kegiatan musrenbang sebagai wadah bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjangkau dan menyalurkan aspirasi secara *bottom up*. Forum musrenbang sendiri terdapat berbagai isu fundamental yang menjadi bagian dari kebutuhan hidup masyarakat. Luasnya cakupan isu yang diangkat dalam musrenbang menjadikan isu yang tidak aktual menjadi sulit dimunculkan seperti isu mitigasi bencana selain juga rendahnya tangkapan isu mitigasi bencana oleh para politisi lokal. Pasca kejadian bencana besar tahun 2017 di Kabupaten Pacitan terdapat beberapa desa yang mengusulkan kegiatan mitigasi bencana yaitu Desa Klesem, Karanganyar, Sidomulyo, Kelurahan Sidoharjo dan Kelurahan Ploso. Tidak semua desa mengangkat Isu mitigasi bencana ini dikarenakan isu mitigasi bencana dipandang tidak prioritas dan bukan sebagai isu rutin dibandingkan dengan isu di bidang lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Isu mitigasi bencana dapat menjadi pembahasan dalam musrenbang jika terdapat pemegang otoritas yang mengangkat isu tersebut. Artinya meskipun masyarakat bertempat tinggal di kawasan rawan banjir, tanah longsor dan tsunami mereka tidak memandang isu mitigasi tersebut penting sehingga pemegang otoritas perlu untuk memunculkan isu mitigasi bencana menjadi suatu keputusan forum musrenbang baik tingkat Kelurahan atau Desa. Isu mitigasi bencana yang dimunculkan oleh pemegang otoritas yaitu Desa Klesem, Petungsinarang, Kembang dan Sidomulyo. Masing-masing pemegang otoritas dari desa tersebut secara langsung memberikan putusan terhadap mitigasi bencana yang menjadi prioritas di desa. Pengambilan keputusan dalam musrenbang cenderung elite dan semi otokratis, sangat berbeda dibandingkan dengan forum Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project yang sangat deliberatif sehingga format diskusi tersebut dapat diadopsi ke dalam musrenbang agar ide dan gagasan masyarakat dapat sepenuhnya menjadi keputusan oleh pengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almash, Rony R dan Pesoth, W. F. Efektifitas Musrenbang Tingkat Kelurahan di Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi, 2012.
- Anggraini, Kurnia Dwi. "The Role of Village Governments in Reducing the Risk of Flood Disaster Through Disaster Preparedness Villages". Indonesian Journal of Cultural and Community Development (June 2021): 6-9
- Asri. Bencana Setahun 778 Kasus, Estimasi Kerugian Capai Rp.16 Miliar Lebih, 26 Desember 2023, diakses 16 Januari 2025. <https://www.grindulufm.co.id/2023/12/bencana-setahun-778-kasus-estimasi.html>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia. Diakses 27 Januari 2025, <https://p2ub.idrip-ina.org/tentang#:~:text=Pada%20tahun%202022%20>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Data Bencana Indonesia 2023. Jakarta: Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, BNPB 2024.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Data Informasi Bencana Indonesia: Statistik Bencana, Korban dan Kerusakan Menurut Jenis tahun 2020-2024. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB 2024, diakses 29 Desember 2024, https://dibi.bnpb.go.id/statistik_menurut_bencana
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kejadian Bencana dan kerugian Tahun 2020-2022, 3 Maret 2023. Diakses 3 Maret 2023. <https://dibi.bnpb.go.id/home/index2s>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pacitan 2022-2026. (BPBD Pacitan, 2022).
- Baehaqie, Muhammad Aqiel, Irfan, Agus, Abijaya, Sastra dan Wildanu, Eka. "Peran Pemerintahan Desa dalam Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana Banjir di Desa Gebangllir kecamatan Gebang Ilir Kabupaten Cirebon" SOSFILKOM No. 1 (Januari-Juni 2023):14-19
- Carstens, Nora. "Digitalisation Labs: A New Arena for Policy Design in German Multilevel Governance." German Politics, Vol.32 No.2 2021: 249-266.
- Chicot, Julien dan Domini, Alberto. "The Role of Citizens In Setting The Visions For Mission-Oriented Research And Innovation". Fteval Journal Vol. 47, 2019: 51-61
- Darin, moonti, Usman dan Dai, Sri Indriyani S. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang (Musrenbang) Desa". Jurnal Oikos-Nomos Vol. 15, No.1, 2022:11-21
- Dewi, Intan Rakhmayanti. BMKG Sebut Gempa Megathrust RI Hanya Tunggu Waktu, Ini Zona Merahnya. 30 Desember 2024. Diakses 24 Januari 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241230110310-37-599471/bmkg-sebut-gempa-megathrust-ri-hanya-tunggu-waktu-ini-zona-merahnya>
- Eferemo, Okoro Faith. "Actors And Roles In Decision-Making Process". Politecnica, 2016: 1-9
- Fadli, Rijal Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." Humanika, 21,

no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

- Far Far., R., A. “Musrenbang (Musrenbang) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 11, No. 1, 2022:57-76
- Faturahman, Burhanudin Mukhamad. “Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik.” *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 2 (October 2018): 122–34.
- Focus Group Discussion. Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Pacitan. (BPBD Kabupaten Pacitan, 2024)
- Forum Pengurangan Risiko Bencana Amandiman Ngoro Puteh. Rencana Penanggulangan Bencana Dan Rencana Aksi Komunitas. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 2023.
- Forum Pengurangan Risiko Bencana Peny Sigap (2023). Rencana Penanggulangan Bencana Dan Rencana Aksi Komunitas. Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, 2023.
- Forum Pengurangan Risiko Bencana Song Tyoso (2023). Rencana Penanggulangan Bencana Dan Rencana Aksi Komunitas. Desa Sumberejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, 2023.
- Habibah, Bintang Aulia. Efektifitas Dialog Jumat Sebagai Model Pembuatan Kebijakan Publik Deliberatif Di Kabupaten Bojonegoro. Universitas Airlangga, 2017..
- Halawa, Epianu dan Bali, Fransiskus Pascal. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Lolowonu Niko’otano Kecamatan Gunungsitoli”. *Jurnal Governance Opinion* No. 2 (Oktober 2020): 76-83
- Ilhami, Rizky. “Analysis Of Actor Involvement In Education Policy Networks”. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 12 No. 2, 2023: 1948-1953
- Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV). Word Risk Report 2024. Berlin: Bündnis Entwicklung Hilft 2024.
- Kementerian Kesehatan. Banjir dan Tanah Longsor di Pacitan, Jawa Timur, 6 Maret 2019, diakses 15 Januari 2025. [https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir %20dan%20Tanah%20Longsor-di-PACITAN-JAWA%20TIMUR-06-03-2019-6](https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir%20dan%20Tanah%20Longsor-di-PACITAN-JAWA%20TIMUR-06-03-2019-6)
- Kumorotomo, Wahyu. Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24/2007. Universitas Gajah Mada, 2010
- Laksmi. “Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi”. *PUSTABIBLIA* Vol. 1 No. 1, 2017.
- Lande, Alfonso, Ferliandre, Anjas dan Anggrain, Meita. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan: Gaya Kepemimpinan, Kepribadian Dan Strategi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)”. *JIHHP* Vol. 2 No.1, 2021:13-22
- Mahanum. “Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Kebijakan”. *Sabilarrasyad* Vol. 6 No.1, 2021:154-163
- Michels, Ank. “Citizen Participation in Local Policy Making: Design and Democracy”.

- Moran, Michael., Rein, Martin., & Goodin, Robert., E. Handbook Kebijakan Publik: Bab 8 Analisis untuk Demokrasi, Schneider & Ingram. (Bandung, Nusa Media, 2015:219)
- Observasi FGD Rencana Kontingensi Tanah Longsor tanggal 24 Oktober 2024
- Pangestu, Septian Dwi dan Fedryansyah, Muhammad. "Implementasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana Di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang". Focus No. 1 (Juli 2023): 192-201
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Rahadjo, Mudjia. Interaksionisme Simbolik dalam Penelitian Kualitatif. (UIN Malang, 2018)
- Rahardjo, Mudjia. Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- Rahman, Dzikri Fadhillah, Fauzi, Lukman Munawar dan Zulfikar, Waluyo "Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta". Praxis Idealis No.1 (Februari 2025): 1-8
- Raihan, "Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Manajemen Dakwah". Jurnal Al-Bayan Vol. 22 No. 34, 2016:65-78
- Rohidi, Rohendi Cecep dan Mulyarto. Analisi data kualitatif. (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992)
- Sagi, Srilalitha. "The Use of Power and Authority in Decision Making Process: A Cross Cultural Perspective". International Journal of Management and Humanities Vol. 1 No. 7, 2015:12-14
- Siregar, Juli Sapitri dan Wibowo, Adik. "Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Kelompok Rentan", Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 10, No. 1, 2019: 30-38
- Toar, Kevin., Kasenda, Ventje dan Singkoh, Frans. "Efektivitas Musrenbang di Kecamatan Kawangkoan Utara". Eksekutif Vol. 3 No. 3, 2019:1-10
- United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Genewa: SFDR, 2015).
- Vancoppenolle, Diederik., Sætren, Harald dan Hupe, Peter. "The Politics of Policy Design and Implementation: A Comparative Study of Two Belgian Service Voucher Programs". Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice Vol. 17 No.2, 2015: 157-173.
- Wahid, Khalil Abdul. Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. Universitas Negeri Malang, 2022.
- Wawancara dengan A dari Bappedalitbang tanggal 21 Agustus 2024
- Wawancara dengan A dari Bappedalitbang tanggal 28 Oktober 2024
- Wawancara dengan D dari ISIMU Pacitan tanggal 11 November 2024
- Wawancara dengan D dari Unmer Madiun tanggal 14 November 2024

Wawancara dengan M dari IDIRP tanggal 25 Juli 2024

Wawancara dengan R dari Desa Sidomulyo tanggal 18 September 2024

Wawancara dengan S dari Dusun Kiteran tanggal 15 September 2024

Wawancara dengan S dari Pemdes Karanggede tanggal 15 Januari 2025

Wawancara dengan D dari BPBD Kabupaten Pacitan tanggal 23 Juli 2024